



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA METRO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AMINUDDIN
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 518699

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	584.300.000
1. MOTOR, YAMAHA SCORPIO 5 BP-Z Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000		
2. MOBIL, HONDA ACCORD CM 5 VTIL AT Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA 44D (XEON) 125 CC Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
4. MOTOR, PIAGGIO VES PRIMAV150 3VIEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
5. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.55 AT Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000		
6. MOBIL, HONDA MOBILIO RS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 243.300.000		
7. MOBIL, DAIHATSU MICRO/MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.709.569
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	592.009.569
III. HUTANG	Rp.	500.000.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

92.009.569

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **21 Juli 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.